

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT DAN
LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY**
*(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2017)*

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi di Universitas Negeri Padang*



Oleh:

MAIDELFIAN PUTRA BAKAR
15043088/2015

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, DAN
LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY

*(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2015-2017)*

Nama : Maidelfian Putra Bakar
NIM/TM : 15043088/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing



Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

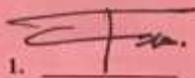
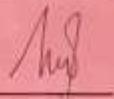
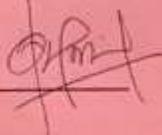
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay*
Nama : Maidelfian Putra Bakar
NIM/TM : 15043088/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, S.E.,M.Sc.,Ak	1. 
2	Anggota	Mia Angelina Setiawan, S.E.,M.Si	2. 
3	Anggota	Halmawati, S.E.,M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maidelfian Putra Bakar
NIM/Tahun Masuk : 15043088/2015
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 05 Mei 1997
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Simpang Perumahan Polda Balai Baru, Kuranji, Padang
No. HP/Telp : 089603343480/-
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Leverage Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2019



Maidelfian Putra Bakar
15043088/2015

ABSTRAK

Maidelfian Putra Bakar, 15043088/2015. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE.,M.Sc.,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay*. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *total sampling*, sehingga didapat sampel sebanyak 57 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 20 dengan tingkat signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai koefisien β sebesar -2,967 dan nilai signifikansi $0,129 > 0,05$, (2) Opini audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* dengan nilai koefisien β sebesar -17,563 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (3) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dengan nilai koefisien β sebesar 48,927 dan nilai signifikansi $0,560 > 0,05$.

Implikasi dari penelitian memberikan bukti bahwa opini audit mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tenggang waktu *audit delay*. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah bukan hanya pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat tetapi juga di seluruh Indonesia agar berkurangnya kasus *audit delay* yang terjadi yang dapat merugikan pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah yang membutuhkan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Audit Delay*, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, *Leverage*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *AUDIT DELAY* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)”**. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia untuk menuju jalan yang diridhai Allah SWT..

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Keahlian Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesainya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menjadi pemimpin di institusi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1, Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan

administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Herlina Helmy, SE,M.S.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memperlancar penulis dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahan sampai akhirnya ke tahap ini.
5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku Dosen Penguji I dan Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Abu Bakar dan Ibunda Suriati tercinta, saudaraku Bang Rifki Bakar, Bang Arief Budiman Bakar, Kak Sri Yuliana Bakar dan Adek Rahayu Surya Bakar, serta keluarga tercinta yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Spesial untuk yang terkasih Sanisah Huri yang selalu menemani, menyemangati, membantu, menghibur dan seperjuangan dalam menghadapi suka duka Skripsi ini hingga akhirnya kita bisa lulus dan wisuda dihari yang sama.
9. Sahabat-sahabat "basecamp banpt" fajarot, rexcy, dolibegu, vegyx, ariefnyix, browidi, rama, ajo tegar dan putrabigal. Sahabat lainnya para pengikut "dewidiw" lainnya gita, ilham, alo, indri, cimon dan liza yang selalu mendukung, membantu dan menghibur penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Berkat kalian suasana perkuliahan menjadi lebih menyenangkan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2015 dan kakak senior yang telah memberikan semangat beserta dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

dengan baik, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ilmiah ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	10
2. Laporan keuangan	13
3. <i>Audit Delay</i>	17
4. Ukuran Pemerintah Daerah.....	19
5. Opini Audit	20
6. <i>Leverage</i>	22
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Konseptual	26
D. Pengembangan Hipotesis	26
1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap <i>Audit Delay</i>	26
2. Pengaruh Opini Audit Terhadap <i>Audit Delay</i>	27
3. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	30
1. Variabel Dependen.....	30
2. Variabel Independen.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian	34
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35

E. Teknik Analisis Data	35
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	35
2. Uji Asumsi Klasik.....	35
3. Uji Hipotesis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian	42
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	42
2. Uji Asumsi Klasik.....	44
3. Uji Regresi Linear Berganda	49
4. Uji Hipotesis.....	51
C. Pembahasan	54
1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap <i>Audit Delay</i>	54
2. Pengaruh Opini Audit Terhadap <i>Audit Delay</i>	56
3. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	58
BAB V PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. IMPLIKASI PENELITIAN	62
C. KETERBATASAN PENELITIAN	62
D. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2 Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 3 Pengambilan Sampel.....	42
Tabel 4 Statistik Deskriptif	42
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Data	45
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 7 Hasil Uji Heterokedastisitas	47
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 10 Hasil Uji <i>Adjusted R</i>²	51
Tabel 11 Hasil Uji t	52
Tabel 12 Hasil Uji f	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu entitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kinerja keuangannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dalam SAP juga dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya. Selain itu, agar relevan informasi harus

disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil (*timeliness*).

Ketika mengacu pada pelaporan keuangan perusahaan publik yang mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sudah seharusnya pelaporan keuangan pemerintah dapat melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Pelaporan dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart, 2009 dalam Fabio Akbar, 2017).

Menurut Gregory dan Van Horn (dalam Hilmi dan Ali, 2008), tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Jadi, semakin cepat informasi laporan keuangan dipublikasikan ke publik, maka informasi tersebut semakin bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dan sebaliknya jika terdapat penundaan yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan suatu keputusan.

Menurut Mohamad (2012) dalam Muladi (2014), pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan dapat digunakan oleh

publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Di Indonesia ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan tersebut menerangkan bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan LKPD kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan tersebut diterima dari pemerintah daerah, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut kepada DPRD, sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD *audited* adalah lima bulan sejak tahun anggaran berakhir (Lase dan Sutaryo, 2014 dalam Rachmawi dkk, 2016).

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian LHP kepada DPRD. Pemerintah daerah dan BPK harus melaksanakan tugasnya masing-masing dalam batas waktu yang telah ditentukan di atas dengan baik agar tidak terjadi *audit delay*, sehingga LHP dapat diserahkan pada DPRD secara tepat waktu. Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor (BPK). Sehingga lamanya waktu

pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK dapat memengaruhi lamanya *audit delay*.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa *audit delay* memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi kinerja pemerintah dan kepentingan para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk membuat keputusan. Namun, hingga saat sekarang ini di Indonesia penelitian mengenai *audit delay* di sektor pemerintah masih sedikit ditemukan. Penelitian *audit delay* sebelumnya lebih banyak dilakukan di sektor swasta, yaitu pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Muladi, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muladi (2014), Siregar (2015) dan Akbar (2017). Berdasarkan penelitian Muladi (2014), pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan SAP, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh signifikan terhadap lamanya *audit delay*, penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2010. Penelitian Siregar (2015) menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*, variabel nilai APBD memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* dan variabel *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di DIY dan Jawa Tengah pada tahun anggaran 2011 dan 2012. Selanjutnya, penelitian Akbar (2017) menunjukkan

bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* dan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia untuk tahun 2013 dan 2014.

Karena terdapat perbedaan variabel, tahun anggaran, populasi penelitian antara beberapa penelitian sebelumnya ini yang menjadi bahan penelitian dan acuan penulis untuk meneliti mengenai permasalahan *audit delay* dengan lingkup yang lebih spesifik dan dikhususkan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Akbar (2017) yang menyarankan penelitian selanjutnya untuk membagi/memisahkan wilayah-wilayah kabupaten/kota di Indonesia agar bisa diteliti lebih spesifik.

Ukuran pemerintah dapat menunjukkan besar kecilnya suatu pemerintahan tersebut. Ukuran pemerintah dapat diukur salah satunya dengan menggunakan jumlah aset pemerintah daerah tersebut. Siregar (2015) menjelaskan bahwa pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya

lebih cepat ke publik. Sehingga akan dapat berpengaruh terhadap lamanya *audit delay*.

Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek. Hal ini dikarenakan opini WTP dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit. Semakin cepat daerah menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit maka *audit delay* yang terjadi juga akan semakin pendek (Hardini, 2015). Sedangkan opini non-WTP misalnya seperti WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dapat memperlama *audit delay*, sebagaimana menurut Payne dan Jensen (2002) menjelaskan bahwa *qualified opinion* (Wajar Dengan Pengecualian) mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan lamanya *audit delay*.

Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran tingkat *leverage* biasanya menggunakan *debt to total asset ratio*. *Debt to assets ratio* pertama kali digunakan dalam penelitian *audit delay*

oleh Carslaw dan Kaplan (1991) dan Ardiati (2004) (dalam Siregar, 2015). Semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya dan diduga dapat mengurangi *audit delay*.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan *Leverage* terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)**”. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menekan *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah dapat ditingkatkan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan informasi yang bermanfaat kepada para penggunanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan penulis adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada *audit delay*?

2. Apakah opini audit yang didapat pemerintah daerah berpengaruh pada *audit delay*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh pada *audit delay*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan :

1. Pengaruh faktor ukuran pemerintah daerah terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh faktor opini audit yang di dapat pemerintah daerah terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh faktor *leverage* terhadap *audit delay*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis : penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai *audit delay* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya.
2. Bagi Akademisi : penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada sektor pemerintahan, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, opini auditor, dan *leverage*.
3. Bagi Pemerintah Daerah : penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dalam penyusunan LKPD yang dapat mempersingkat waktu penyerahan

LKPD kepada BPK RI, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan mencermati beberapa faktor yang dibahas dalam penelitian ini yang berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* sehingga penyampaian laporan keuangan dapat terlaksana tepat waktu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Rachmawi, 2016). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi risiko.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rachmawi (2016) menjelaskan adanya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen, yaitu:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi tentang sifat manusia, hubungan antar anggota organisasi, dan asimetri informasi juga relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Dalam organisasi pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili oleh dewan (DPRD), sedangkan pengelola atau manajemen adalah pemerintah (Siregar, 2015).

Menurut Lane (2003) dalam Abdullah dan Halim (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal senada sebelumnya juga dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Selanjutnya Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa hubungan prinsipal-agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis

komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), *moral hazard*, dan *adverse selection* (Abdullah dan Halim, 2006).

Dalam kasus pemerintah daerah, DPRD memonitor pemerintahan yang dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Prinsipal memonitor kerja agen agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik itu sendiri menjelaskan bahwa kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR, dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) yang merupakan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas (Siregar, 2015).

Dalam penerapan teori keagenan, *audit delay* perlu diperhatikan. *Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat informasi laporan keuangan menjadi kurang relevan bagi para pengguna apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu. Informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan/kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*) (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Muladi, 2014).

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada prinsipal yang akan menimbulkan adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal secara detail dibandingkan pihak prinsipal yang hanya mengetahui informasi secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh agen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu untuk mengurangi adanya ketidaksesuaian informasi (*asymmetric information*) antara pihak agen dengan pihak prinsipal, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas pada suatu periode dan disajikan secara terstruktur. Laporan keuangan disajikan dengan tujuan

memenuhi kebutuhan penggunaanya agar dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola entitas yang telah dipercayakan.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi sebagai pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan, serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- 3) Neraca.
- 4) Laporan Operasional (LO).
- 5) Laporan Arus Kas (LAK).
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain itu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga telah menetapkan karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan di sini berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu. Sebagaimana terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2005) bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan akan berakibat pada hilangnya relevansi laporan keuangan.

3. *Audit Delay*

Audit delay adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor (Carslaw dan Kaplan, 1991). Hal senada juga dikatakan oleh Payne dan Jensen (2002) yang

mengatakan bahwa *audit delay* adalah rentang waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. Halim (2000) juga mengatakan bahwa *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Carslaw dan Kaplan (1991) mengemukakan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK dan kinerja yang kurang baik dari BPK, maka kemungkinan untuk muncul *audit delay* yang panjang semakin besar.

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Hilmi dan Ali (2008) menggunakan tiga kriteria keterlambatan pelaporan (*audit delay*) yaitu sebagai berikut:

1. *Preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan (31 Desember) sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa. Dalam konteks sektor publik berarti dari tanggal LK sampai tanggal penyerahan LK kepada BPK.
2. *Auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan (31 Desember) sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
3. *Total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan (31 Desember) sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004 telah memisahkan dengan jelas antara jangka waktu penyampaian laporan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK. Jangka waktu tersebut telah ditetapkan bahwa jangka waktu dalam penyampaian laporan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan jangka waktu pemeriksaan LKPD oleh BPK adalah 2 bulan sejak LKPD tersebut diterima. Sehingga semakin lama pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK dan semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay* yang terjadi.

Kedua hal tersebut menjadi penentu lamanya *audit delay* yang terjadi pada pelaporan keuangan pemerintah. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Setelah informasi yang relevan tersedia lebih cepat akan mampu meningkatkan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi kegunaan dari informasi tersebut (Kieso, dkk. 2011 dalam Akbar, 2017).

4. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran organisasi dapat menunjukkan besar kecilnya suatu organisasi tersebut. Menurut Hidayat dan Isroah (2016) nilai dari ukuran perusahaan dapat diperoleh dari total aset perusahaan karena nilai aset cenderung lebih stabil. Dyer

dan Mc Hugh dalam Hilmi dan Ali (2008) menjelaskan perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih dan sistem pengendalian internal yang kuat serta adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat. Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah, ukuran pemerintah dapat digambarkan melalui besar kecilnya jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Senada dengan hal di atas, Siregar (2015) mengatakan bahwa pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik. sehingga akan dapat berpengaruh terhadap lamanya *audit delay*.

5. Opini Audit

Opini audit merupakan tujuan utama dan hasil dari dilakukannya proses audit oleh auditor. Arens et al. dalam Tiono dan Yulius (2013) mengemukakan bahwa opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal (Akbar, 2017).

Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK selaku auditor, yaitu:

- 1) Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).
- 2) Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
- 3) Opini tidak wajar (*adversed opinion*).
- 4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Namun selain opini-opini di atas BPK juga memberikan opini lain yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.

Hardini (2015) menjelaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek. Hal ini dikarenakan opini WTP dapat menunjukkan bahwa

daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit. Semakin cepat daerah menyampaikan laporan keuangannya untuk diaudit maka *audit delay* yang terjadipun akan semakin pendek. Sedangkan opini non-WTP misalnya seperti WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dapat memperlama *audit delay*, sebagaimana menurut Payne dan Jensen (2002) menjelaskan bahwa *qualified opinion* (Wajar Dengan Pengecualian) mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan lamanya *audit delay*.

6. *Leverage*

Leverage adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Siregar (2015) mengatakan pengukuran tingkat *leverage* biasanya menggunakan *debt to total assets ratio*.

Pengukuran tingkat *leverage* menggunakan *debt to total assets ratio* pertama kali digunakan dalam penelitian *audit delay* oleh Carslaw dan Kaplan (1991). Ada dua alasan utama yang dapat mendukung digunakannya pengukuran *debt to total assets ratio* yaitu:

- 1) *Debt to total asset ratio* mengindikasikan kesehatan dari perusahaan. *Debt to total asset ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatiannya karena ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Auditor beranggapan bahwa kesehatan pemerintahan yang rendah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehingga auditor akan meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit.
- 2) Mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal (Carslaw dan Kaplan, 1991). *Debt to total asset ratio* yang tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Pemerintah akan mengurangi risiko dengan memundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan dalam tingkat risiko yang tinggi, dengan demikian auditor akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan *audit delay*.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *audit delay* di sektor publik masih sedikit ditemukan dibandingkan sektor swasta. Ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

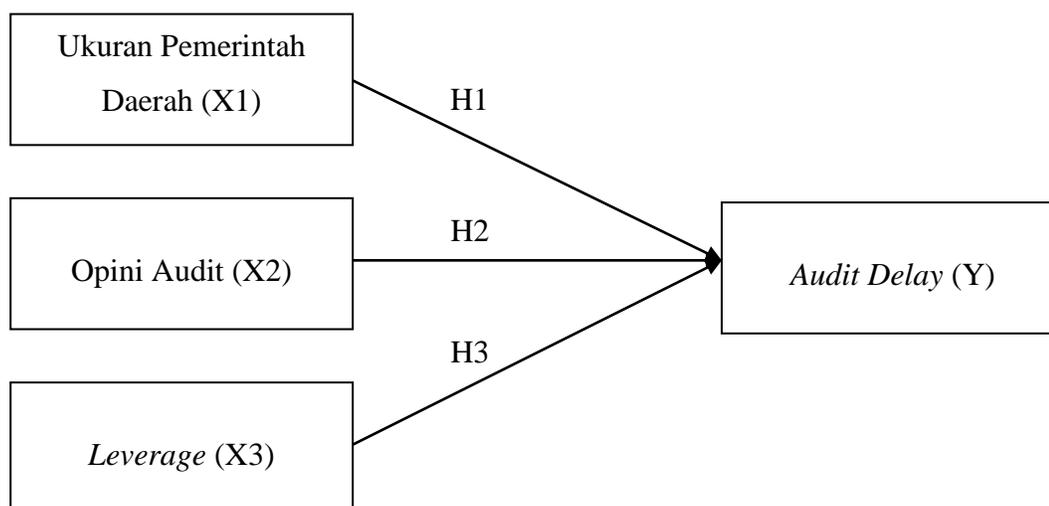
No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aris Muladi (2014)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Delay</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel dependen: <i>Audit delay</i> Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 2. Ukuran pemerintah daerah 3. Pengalaman pemerintah daerah 4. Tingkat ketergantungan daerah 5. Terpilihnya kepala daerah 6. Jumlah temuan audit 7. Opini audit 	Hasil pengujian statistik menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh signifikan terhadap lamanya <i>audit delay</i> . Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> . Jumlah temuan audit dan jenis opini audit terbukti berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> .
2.	Baldric Siregar (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap <i>Audit Delay</i> Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel dependen: <i>Audit Delay</i> Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah 2. Nilai APBD 3. <i>Leverage</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dan tingkat <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> laporan keuangan. Nilai APBD tidak signifikan mempengaruhi audit delay laporan keuangan.

3.	Ziza Gita Hardini dan Sukirman (2016)	Analisis Determinan Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	<p>Variabel dependen: <i>audit delay</i></p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kinerja 2. Ukuran daerah 3. Opini audit 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja, ukuran daerah dan opini audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Namun secara parsial menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>, variabel ukuran daerah dan opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>audit delay</i> pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012.</p>
4.	Fabio Akbar (2017)	Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Audit delay</i> .	<p>Variabel dependen: <i>Audit delay</i></p> <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah 2. Opini audit 3. <i>Leverage</i> 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>, variabel opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i>, dan variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>.</p>

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan variabel bebas berupa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan banyaknya aset yang dimiliki, opini audit yang didapat dan tingkat *leverage* yang diukur menggunakan *debt to total asset ratio*. Hubungan antar variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian pada gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap *Audit Delay*

Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan laporan keuangannya lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang

memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat yang memungkinkan pemerintahan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik (Siregar, 2015). Hal tersebut di dukung oleh penelitian Courtis di New Zealand (1976), Gilling (1977), Davies dan Whitterd di Australia (1980), dan lain sebagainya dalam Imam, et al (2001) yang menunjukkan bahwa *audit delay* memiliki hubungan negatif dengan ukuran pemerintahan. Artinya bahwa semakin besar aset pemerintahan maka semakin pendek *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2. Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil audit laporan keuangan tahunan pada akhir periode, pendapat ini dapat menjadi sebuah penilaian akan kesuksesan suatu kinerja pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah dari auditor menunjukkan bahwa tidak banyak salah saji yang ditemukan oleh auditor pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah menyusun laporan keuangannya

dengan baik dan sesuai standar. Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi cerminan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun laporan keuangannya dan semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa maka akan semakin pendek pula *audit delay* yang terjadi (Hardini, 2016).

Hal ini didukung oleh penelitian McLelland dan Giroux (2000), Payne dan Jensen (2002), dan Muladi (2014) yang menunjukkan bahwa opini non-WTP seperti Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) akan meningkatkan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Audit Delay*

Leverage adalah pengukuran kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan perusahaan maka

auditor akan meningkatkan kehati hatiannya sehingga rentang *audit delay* akan lebih panjang (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Namun jika dilihat dari sudut pandang lain tingkat *leverage* yang tinggi dapat mengurangi lamanya waktu *audit delay*. Hal ini didukung oleh penelitian Siregar (2015) yang membuktikan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay*. *Leverage* diukur dengan *Debt to Total Assets Ratio*. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat *audit delay* semakin rendah. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya dan diduga dapat mengurangi *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai ukuran pemerintah daerah, opini audit dan *leverage* terhadap *audit delay* pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap *Audit Delay*

Hipotesis pertama tidak terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini berarti besar atau kecilnya ukuran pemerintah daerah bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan berakibat pada bertambahnya tenggang waktu *audit delay*, karena unsur kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan pengawasan dari agen (DPRD dan masyarakat) mengharuskan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

2. Opini Audit Terhadap *Audit Delay*

Hipotesis kedua terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit (X2) berpengaruh signifikan negatif

terhadap *audit delay*, artinya pemerintah daerah yang mendapat opini audit yang baik (WTP) akan dapat memperpendek tenggang waktu *audit delay* yang terjadi. Hal ini dikarenakan opini WTP dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki salah saji materiil yang cenderung kecil dan dapat menjadi gambaran bahwa daerah tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih cepat sehingga daerah tersebut akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diaudit. Karena dalam upaya mendapatkan opini audit yang baik (WTP) pemerintah daerah berusaha untuk semakin baik dalam melakukan pelaporan keuangan baik dari segi waktu pelaporan maupun materi pelaporannya.

3. *Leverage Terhadap Audit Delay*

Hipotesis ketiga tidak terdukung dalam penelitian ini yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* (X3) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Tingkat rasio *leverage* yang diukur menggunakan *debt to total assets* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumbar terbilang baik karena tidak ada yang mendekati 1, nilai maksimumnya 0,05. Hipotesis yang diajukan sebelumnya didasarkan pada asumsi semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi yang berarti banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Semakin cepat pemerintahan

menyusun laporan keuangannya maka akan semakin cepat pula BPK dalam melaksanakan proses auditnya. Tidak berpengaruhnya variabel *leverage* (X3) terhadap *audit delay* kemungkinan diakibatkan rendahnya tingkat rasio *leverage* pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar selama tahun 2015-2017.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, memberikan bukti bahwa opini audit yang baik (WTP) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tenggang waktu *audit delay*. Keberadaan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah bukan hanya pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat tetapi juga di seluruh Indonesia agar berkurangnya kasus *audit delay* yang terjadi yang dapat merugikan pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah yang membutuhkan ketepatanwaktuan penyampaian pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini telah dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin akan berbeda jika dilakukan di wilayah lain, mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.

2. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun anggaran yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengurangi tenggang waktu *audit delay* agar berkurangnya kasus *audit delay* yang terjadi pada pemerintah daerah. Seperti halnya opini audit yang baik (WTP) pada hasil penelitian ini terbukti dapat memperpendek tenggang waktu *audit delay*. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP diharapkan mempertahankannya dengan sebaik-baiknya dan yang mendapatkan opini audit selain WTP diharapkan dapat meningkatkannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Diharapkan penelitian selanjutnya lebih dapat memaksimalkan penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* seperti: pengalaman pemerintah daerah, tingkat ketergantungan daerah dan akuntabilitas kinerja.

- 2) Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sumber data yang digunakan maupun jangka waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.
- Akbar, Fabio. 2017. "Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage Terhadap Audit Delay". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Amy, Mauliddya. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia." *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Angruningrum, Silvia dan Made G. Wirakusuma. 2013. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komplexitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada Audit Delay". Dalam *E-Journal Akuntansi*. Vol 5 No 2. Hal 251-270 Bali: Universitas Udayana.
- Arifa, Alvina Noor. 2013. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Carslaw, C.A.P.N., and Kaplan, S.E., 1991. "An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand". *Accounting and Business Research*, Vol. 22. No. 85. pp. 21-32.
- Cohen, Sandra. dan Laventis, Sergio. 2013. "Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay". *Accounting Forum Volume 37*. Elsevier.
- Fachrurozi, Luthfi. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia." *Skripsi*". Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013 "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi". Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Variananda. 2000. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan di BEJ." *Jurnal Bisnis Akuntansi*. Yogyakarta, Vol 2 No 1 Hal 63-75.
- Hardini, Ziza Gita. 2015. "Pengaruh Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah, dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hardini, Z., & Sukirman, S. (2016). "Analisis Determinan Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Hidayat, Shodiq Nur dan Isroah. 2016. "Pengaruh Karakteristik Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Return". *Jurnal Profita*, 6.

- Hilmi, Utari dan Ali, Syaiful. 2008. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006)". *Simposium Nasional Akuntansi XI Surabaya*.
- Imam, Shahed. 2001. "Association of Audit Delay and Audit Firms International Links: Evidence from Bangladesh". *Managerial Auditing Journal*, Volume 16 (3).
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. "Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. 3.
- Mardiasmo. 2009. "Akuntansi Sektor Publik". Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Marni, dkk. 2019. "The Influence of Government Size, Audit Opinion and Incumbent on Audit Delay in the Provincial Government in Indonesia". *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 12 No. 2 January 2019, pp. 118-126. Indonesia : Universitas Andalas.
- McLelland, A. dan Giroux, G. 2000. "An Emprical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities". *Journal of Accounting and Public Policy* 19.
- Muladi, Aris. 2014. "Faktor-faktor yang mmepengaruhi Audit delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Pallant, J. 2011. "SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS". Australia: Allen & Unwin
- Payne, J. dan Jensen, K. 2002. "An Examination of Municipal Audit Delay". *Journal of Accounting and Public Policy* 21.
- Rachmawati, S. 2008. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 10*.
- Rachmawi, S., Rini, Fitri, Y. 2016. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 9 (1).
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2006. *Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. "Research Methods for business". Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Siregar, Baldric. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Volume 11 Nomor 2.
- Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Syahyuni, I.E., dkk. 2018. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit Delay". *Skripsi*. Padang: FE UNP.
- Tiono, Ivena dan Yulius Jogi C. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra*, 8(2), pp: 65-82.